

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PEMERINTAH

KABUPATEN BANTUL PADA MASA KEPEMIMPINAN

SRI SURYA WIDATI TAHUN 2010-2015

(Studi Kasus di Kecamatan Kretek)

Oleh: Siti Munawaroh (20130520109)

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bantul. Alasan memilih Bantul karena: (1) Bupati Bantul adalah Bupati perempuan pertama di DIY; (2) Bupati Bantul dianggap sebagai pelanggaran kekuasaan suaminya yaitu Idham Samawi yang menjabat dari tahun 1999-2009; (3) meskipun dianggap sebagai pelanggaran kekuasaan (politik dinasti) namun Ibu Sri Surya Widati memiliki kinerja yang baik versi laporan pemerintah. Selain itu, adanya capaian-capaian dari Pemerintah Kabupaten Bantul, seperti nilai akuntabilitas meningkat dari C menjadi B, meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), tingkat pendidikan meningkat, meningkatnya pertumbuhan ekonomi, menurunnya angka kemiskinan, dll. Akan tetapi, capaian-capaian tersebut perlu dibuktikan dengan persepsi masyarakat, karena meningkat menurut level elit belum tentu meningkat menurut masyarakat. Dengan demikian, diperlukannya bukti nyata untuk melihat kesesuaian antara capaian pemerintah dengan apa yang terjadi di masyarakat. Untuk pengukuran kinerjanya menggunakan misi Bupati dan juga capaian-capaian dari Bupati seperti yang telah disebutkan di atas, dan menggunakan indikator kinerja yaitu produktifitas, kualitas layanan, responsivitas, dan akuntabilitas.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan kuantitatif. Lokasi penelitian terletak di Kecamatan Kretek, yang terdiri dari 5 kelurahan. Alasan mengambil Kecamatan Kretek sebagai tempat penelitian karena di tempat inilah calon *incumbent* mengalami kekalahan terbesar, walaupun wilayah ini basis dari PDIP yang merupakan partai pengusung *incumbent*. Alasan yang lain adalah kecamatan ini merupakan kecamatan yang maju dalam sektor pariwisata namun dari 17 kecamatan di Bantul, Kecamatan Kretek berada diposisi 3 terbawah untuk angka kemiskinan, sehingga adanya pariwisata apakah tidak berdampak pada masyarakat. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah proporsional sampling yaitu berdasarkan jumlah dari penduduk di masing-masing kelurahan. Analisis data untuk kuesioner menggunakan skala indeks.

Kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul dilihat dari 4 aspek yaitu produktifitas, kualitas layanan, responsivitas dan akuntabilitas yang sesuai dengan 4 (empat) misi Bupati dan juga sesuai dengan capaian yang diungkapkan oleh Pemerintah Daerah Bantul, dan juga indikator kinerja berdasarkan LKJ 2015. Berdasarkan persepsi masyarakat hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja dari Pemerintah Kabupaten Bantul tahun 2010-2015 adalah dalam kriteria baik yaitu dengan rata-rata indeks 2,73. Aspek produktifitas mendapatkan nilai rata-rata indeks 2,74 dengan kriteria baik. Aspek kualitas layanan mendapatkan nilai rata-rata indeks 2,96 dengan kriteria baik. Aspek responsivitas mendapatkan nilai rata-rata indeks 2,69 dengan kriteria baik. Aspek akuntabilitas mendapatkan nilai rata-rata indeks 2,64 dengan kriteria baik. Akan tetapi, yang perlu diperbaiki adalah dalam hal transparansi pengelolaan keuangan, transparansi pelayanan, jaminan kesehatan, dan pengangguran, karena 4 hal tersebut yang dinilai kurang baik oleh masyarakat.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setelah diberlakukannya otonomi daerah setiap daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri (Undang-undang No.23 tahun 2014). Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dan memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Kepala Daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Bupati.

Inti dari pelaksanaan otonomi daerah menurut Rasyid (2000, dalam Nugroho, 2000: 142) adalah terdapatnya keleluasaan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreativitas, dan peran serta aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya. Adanya otonomi daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus serta mengembangkan daerahnya, sesuai dengan kepentingan dan potensinya.

Pemberlakuan UU No.32 Tahun 2004 yang kemudian diganti dengan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan angin segar serta

nafas baru bagi upaya membangun dengan keterlibatan masyarakat daerah dan juga meningkatkan potensi milik daerah untuk kepentingan masyarakat. Peningkatan pelayanan, pemberdayaan serta peran dari masyarakat menjadi kata kunci dalam pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini disebabkan semangat dari otonomi daerah merupakan mendekatkan pelayanan pemerintah kepada warga negara yang selama masa pemerintahan orde baru lebih bercorak sentralistis.

Kepala Daerah sebagai pemimpin organisasi administrasi pemerintahan daerah dituntut untuk bersikap proaktif dengan mengandalkan kepemimpinan yang berkualitas untuk membangkitkan semangat kerja dari bawahannya, mampu menggerakkan masyarakat untuk berperan aktif dan berpartisipasi dalam pembangunan serta mampu menjadi kreator, inovator dan fasilitator dalam rangka efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah (Kaloh, 2003: 6).

Kepala Daerah merupakan figur atau manajer yang menentukan efektivitas pencapaian tujuan organisasi pemerintah daerah. Keberhasilan dari pembangunan nasional juga ditentukan dari keberhasilan sebuah daerah, sehingga jika kinerja dari Pemerintah Daerah buruk akan berdampak pada pemerintahan nasional, yaitu rendah atau berkurangnya kinerja efektivitas penyelenggaraan nasional. Dengan demikian, Kepala Daerah dan perangkat daerah harus saling bekerjasama untuk mencapai tujuan daerah.

Keberhasilan dari sebuah daerah dapat dilihat dari beberapa kriteria, antara lain semakin berkurangnya angka kemiskinan, meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat, tingkat kesejahteraan masyarakat dan tingkat kesehatan Osborne dan

Gabler (1992, dalam Kaloh, 2003: 6). Kepala Daerah yang menentukan efektivitas pencapaian tujuan organisasi pemerintahan daerah, yaitu menentukan arah dan tujuan organisasi pemerintahan daerah. Hal ini ditentukan berdasarkan kemampuan, kompetensi, dan kapabilitas Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi-fungsi administrasi, kepemimpinan, pembinaan dan pelayanan serta tugas-tugas lain yang menjadi kewajiban dan tanggungjawabnya (Kaloh, 2003: 4).

Seorang Kepala Daerah selalu dihadapkan dengan berbagai tantangan dan keadaan dalam memimpin organisasi administrasi daerah. Keadaan dan tantangan yang dihadapi oleh Kepala Daerah antara lain bagaimana mewujudkan otonomi luas, nyata, dan bertanggungjawab sebagai suatu paradigma baru, yang didukung oleh kualitas sumber daya aparatur yang prima, sumber alam dan sumber keuangan serta sarana dan prasarana yang memadai, yang mampu meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dan kehidupan masyarakat melalui program dan strategi pelayanan dan pemberdayaan.

Menurut Kaloh (2003: 4) Kepala Daerah merupakan komponen strategis dalam mengupayakan terwujudnya pelayanan yang berkualitas, baik pelayanan internal organisasi maupun pelayanan eksternal kepada masyarakat. Seorang Kepala Daerah menerapkan pola dan strategi mendengarkan, merasakan, menanggapi, dan mewujudkan keinginan, aspirasi, tuntutan dan kepentingan masyarakat dan tuntutan organisasi, merupakan kekuatan dalam upaya mewujudkan tujuan organisasi, dan peningkatan kehidupan serta kesejahteraan masyarakat.

Setiap daerah berlomba-lomba agar dapat membuat daerahnya maju dan masyarakatnya sejahtera, seorang Kepala Daerah harus kreatif dan inovatif sehingga roda pemerintahan yang berada di tangannya mampu untuk dikendalikan dan perangkat daerah mampu menjalankan kewajibannya. Hal yang menjadi perhatian dengan adanya otonomi daerah adalah semakin banyaknya dinasti politik dalam sebuah kepemimpinan daerah di Indonesia setelah adanya otonomi daerah.

Semenjak terjadinya pilkada di Indonesia hingga saat ini tercatat ada sembilan dinasti politik yang terjadi dan berupa pewarisan kekuasaan Kepala Daerah kepada keluarganya. Salah satunya adalah yang terjadi di Kabupaten Bantul, dimana jabatan Bupati yang diduduki oleh Idham Samawi yang menjabat dari tahun 1999-2010, dilanjutkan oleh istrinya Sri Suryawidati atau sering disebut Idha Samawi. Sri Surya Widati disebut-sebut sebagai alat untuk pelanggaran kekuasaan Idham Samawi di Bantul (Adninda, 2013). Akan tetapi, politik dinasti bukan menjadi fokus dari penelitian ini, tetapi lebih untuk melihat kinerja dari Bupati yang “katanya” hanya sebagai alat penerus kekuasaan. Kabupaten Bantul menjadi daerah yang memiliki daya tarik tersendiri di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, karena kabupaten ini dipimpin oleh seorang Bupati perempuan yang pertama di Jogja yaitu Sri Surya Widati untuk periode 2010-2015 (Bawono, 2016).

Walaupun dianggap sebagai pelanggaran kekuasaan, namun selama 5 tahun menjabat adanya kemajuan di Kabupaten Bantul. Penelitian ini berawal adanya klaim-klaim atau capaian dari Pemerintah Daerah yang digunakan oleh

Bupati saat akan mencalonkan diri dalam pilkada 2015 yang lalu dan juga indikator kinerja pemerintah daerah yang mencapai 100%. Berikut hasil capaian dari Pemerintah Kabupaten Bantul tahun 2010-2015 (KPUD, 2015 diakses 15 Oktober 2016), yaitu: (1) meningkatnya pendapatan petani; (2) menurunnya angka kemiskinan; (3) meningkatnya pertumbuhan ekonomi; (4) tingkat pendidikan meningkat; (5) indeks kepuasan masyarakat meningkat; (6) kualitas pelayanan kesehatan meningkat; (7) menguatnya kepercayaan Pemerintah Pusat dan DIY atas prestasi pengelolaan keuangan Kabupaten Bantul dengan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.

Selain itu juga adanya pencapaian 100% indikator kinerja yang sebelumnya dirancang pada RPJMD 2011-2015 dan kemudian dilihat hasilnya di Laporan Kinerja (LKJ) Pemerintah Daerah tahun 2015, yaitu: (1) nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah meningkat dari C menjadi B; (2) nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD); (3) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); (4) persentase Gizi Buruk; (5) usia harapan hidup; (6) angka melek huruf; (7) tingkat ketersediaan energi dan protein; (8) persentase peningkatan jumlah wisatawan; (9) angka pengangguran; (10) persentase desa tangguh; (11) opini pemeriksaan BPK; (12) rata-rata lama sekolah.

Capaian yang telah disebutkan di atas baik itu yang digunakan Bupati dalam pilkada maupun hasil indikator kinerja yang mencapai 100% dilihat dari Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (2015) berasal dari level elit, namun di sini belum diketahui bagaimana tanggapan atau persepsi dari masyarakat terkait capaian tersebut, karena bagaimanapun meningkat menurut elit belum tentu

meningkat bagi masyarakat, sehingga diperlukannya pembuktian dari capaian-capaian tersebut berdasarkan pandangan masyarakat. Hal ini perlu dibuktikan pula perihal tanggapan masyarakat terkait kinerja Pemerintah Daerah.

Alasan mengambil Kabupaten Bantul karena: (1) Bupati Bantul merupakan Bupati perempuan pertama di Daerah Istimewa Yogyakarta; (2) belum adanya penelitian terkait kinerja Bupati Bantul. (2) kepemimpinan Sri Surya Widati dikatakan sebagai pelanggaran kekuasaan dari suaminya (Idham Samawi), sehingga penting untuk diketahui kemampuan dalam memimpin dan bagaimana kinerjanya; (3) menurut pemerintah daerah, tingkat pendidikan di Bantul mengalami peningkatan. Akan tetapi, angka melek huruf di Bantul berada diposisi ke-5 setelah Kota Yogyakarta, Sleman, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bantul, dan Gunung Kidul, sehingga perlunya persepsi masyarakat terkait pendidikan; (4) usia harapan hidup (UHH) di Bantul berada diposisi terendah setelah Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sleman, Kota Yogyakarta, Gunung Kidul, dan Bantul. Usia harapan hidup ini berkaitan erat dengan kesehatan, keadaan pangan, dan kondisi perekonomian.

Sementara itu, alasan mengambil di Kecamatan Kretek: (1) secara geografis kecamatan ini berada di pinggiran Kabupaten Bantul dan masuk dalam kawasan pantai Selatan. Walaupun berada di pinggir Kabupaten Bantul tetapi kecamatan ini tidak memiliki jarak yang cukup jauh dari pusat kota, sehingga Bupati bisa dengan mudah meninjau ke kecamatan tersebut. Peninjauan ini tentunya berkaitan dengan dedikasi (pengorbanan tenaga, waktu dan pikiran) Bupati.

Hal ini berkaitan dengan selama 5 tahun kepemimpinannya pernah atau tidak berkunjung ke kecamatan, untuk sekedar menjangar aspirasi masyarakat, melihat keadaan langsung di lapangan, karena seorang Bupati turun ke daerah itu cukup penting dan bisa menghasilkan dampak yang luas biasa. Inspeksi dadakan yang dilakukan seorang Bupati akan membuat perangkat daerah menjadi lebih disiplin dalam bekerja; (2) Kecamatan Kretek merupakan daerah dengan tempat wisata yang cukup banyak dan digemari pengunjung. Selain itu juga adanya peningkatan presentase jumlah wisatawan jika dilihat dari LKJ Pemerintah Daerah, sehingga adanya pariwisata tersebut apakah mendatangkan dampak yang positif bagi masyarakat dan mampu meningkatkan taraf hidup serta mensejahterakan masyarakat sekitarnya, dan membuat pembangunan di kecamatan tersebut maju dengan pesat atau tidak; (4) Kretek merupakan kecamatan dengan keunggulan pariwisatanya, namun dari 17 kecamatan di Kabupaten Bantul presentase jiwa miskin di kecamatan ini berada di posisi 3 terbawah setelah Pajangan dan Banguntapan (Laporan Kinerja Pemerintah, 2015), sehingga penting diketahui adanya kemajuan sektor pariwisata mampu mendatangkan dampak positif ke masyarakat atau tidak.

Berdasarkan uraian di atas penelitian ini untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Daerah dilihat dari Misi Bupati, capaian atau klaim dari Pemerintah Daerah yang kemudian digunakan oleh Bupati saat mencalonkan diri dalam pemilukada 2015, serta melihat kesesuaian capaian 100% dari indikator kinerja Pemerintah Daerah yang sebelumnya dilihat dalam LKJ (2015) dengan yang terjadi atau dialami oleh masyarakat. Akan tetapi penggunaan

misi Bupati, capaian, dan capaian 100% indikator kinerja tidak digunakan keseluruhan melainkan hanya mengambil yang *relevan* dengan keadaan di lokasi penelitian.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana persepsi masyarakat Kecamatan Kretek terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul pada Masa Kepemimpinan Sri Surya Widati tahun 2010-2015?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat Kecamatan Kretek terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul pada Masa Kepemimpinan Sri Surya Widati tahun 2010-2015.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Manfaat untuk sisi keilmuan diharapkan memperkaya *literature* yang mengkaji masalah persepsi masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Daerah;
- 2) Menjadi referensi selanjutnya terkait persepsi masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Daerah.

b. Manfaat Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Bupati dan perangkat daerahnya;

- 2) Dapat memberikan hasil atau manfaat dalam usaha meningkatkan serta mengembangkan kualitas agar menghasilkan kinerja yang lebih baik dari Pemerintah Daerah dan juga Bupati yang sedang menjabat.

D. Kerangka Dasar Teori

1. Persepsi

Menurut Kreitner (2003: 208) (dalam Adi, 1994: 105) persepsi adalah proses kognitif yang memungkinkan kita dapat menafsirkan dan memahami lingkungan sekitar kita. Persepsi akan timbul setelah seseorang atau sekelompok manusia terlebih dahulu merasakan kehadiran suatu objek dan setelah dirasakan akan menginterpretasikan objek yang dirasakan tersebut, seperti pendapat Kimball Young “Persepsi merupakan suatu yang menunjukkan aktivitas merasakan, menginterpretasikan, memahami objek fisik maupun sosial, cara pandang, pendapat, dan opini mengenai kejadian yang sedang dan telah terjadi (Walgito, 2003: 89).

2. Kinerja

Kinerja adalah gambaran pokok mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam rencana strategis suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu Mahsun (dalam Mutiarin dan Zaenuddin, 2014: 77).

Pengukuran Kinerja

Setiap kinerja dari sebuah organisasi maupun individu dapat diukur menggunakan indikator dan faktor-faktor tertentu. Menurut Dwiyanto (2012: 50-51) terdapat 5 indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja:

- 1) Produktivitas Konsep produktifitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara *input* dengan *output*.
- 2) Kualitas Layanan Kualitas layanan sangat penting dalam menjelaskan kinerja dari organisasi publik. Banyak pandangan negatif muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik.
- 3) Responsivitas Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
- 4) Responsibilitas Responsibilitas adalah pelaksanaan kegiatan organisasi publik dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit.
- 5) Akuntabilitas Akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat publik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya adalah para pejabat politik

tersebut karena dipilih oleh rakyat, maka dengan sendirinya akan selalu merepresentasikan kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, konsep dasar akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak.

E. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan kuantitatif. Lokasi penelitiannya berada di Kecamatan Kretek dengan jumlah populasi 23.523 dan jumlah sampel 100 orang yang tersebar di 5 kelurahan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Survei dengan menggunakan kuesioner, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah skala indeks untuk menghitung hasil dari kuesioner.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian terkait kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul pada Masa Kepemimpinan Sri Surya Widati tahun 2010-2015 jika dilihat dari aspek produktifitas, kualitas layanan, responsivitas, dan akuntabilitas yang sesuai dengan misi Bupati Bantul, capaian Pemerintah Daerah yang digunakan oleh Bupati saat mencalonkan dalam pilukada, dan juga berdasarkan indikator kinerja yang ada dalam LKJ 2015 secara keseluruhan mendapatkan nilai rata-rata indeks 2,73 dengan kriteria baik. Capaian yang diungkapkan oleh level elit, dan juga indikator kinerja dilihat dari LKJ sudah sesuai dengan yang dirasakan oleh

masyarakat Kretek, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya nilai rata-rata dengan kriteria kurang baik terhadap capaian Pemerintah Kabupaten Bantul tersebut.

Sementara itu, hasil dari kinerja berkaitan dengan aspek produktifitas nilai rata-rata indeksnya adalah 2,74 dengan kategori baik. Hal ini karena efektifitas dan efisiensi birokrasinya yang sudah baik dan membuat masyarakat puas, selain itu juga masyarakat mengatakan bahwa Bupati memiliki dedikasi yang baik.

Aspek kualitas layanan rata-rata indeks yang diperoleh 2,96 dengan kriteria baik, karena adanya peningkatan dalam kualitas pelayanan oleh kantor pemerintah, selain itu juga adanya peningkatan pada sarana prasarana kesehatan dan kualitas pelayanan kesehatan. Persepsi yang diberikan oleh masyarakat dan hasil yang ada dalam Laporan Kinerja Pemerintah telah sesuai, sehingga peningkatan kesehatan dan kualitas pelayanan yang meningkat bukan hanya berdasarkan pandangan level elit.

Aspek responsivitas rata-rata indeks yang diperoleh 2,69 dengan kriteria baik, karena adanya peningkatan kualitas pendidikan, kualitas sarana dan prasarana ekonomi, masyarakat semakin sejahtera, kemudian peningkatan dalam hal ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi. Sektor pariwisata juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya itu saja sarana dan prasarana publik untuk penanggulangan bencana mengalami peningkatan. Sementara itu, yang belum mampu ditangani adalah pengangguran karena tidak mengalami penurunan, hal ini disebabkan ketidakmampuan Bupati untuk membuka lapangan pekerjaan, selain itu juga terkait jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan belum merata dan tidak tepat sasaran. Aspek

responsivitas ini berguna untuk melihat respon dari pemerintah daerah terkait kebutuhan masyarakat, jika kebutuhan masyarakat direspon oleh pemerintah akan terjadi peningkatan dalam sektor tersebut, seperti pertumbuhan ekonomi meningkat, tingkat pendidikan meningkat, kualitas dan sarana prasarana ekonomi mengalami perbaikan, sarana publik dalam penanggulangan bencana juga meningkat, masyarakat sejahtera ditandai dengan menurunnya angka kemiskinan, hal ini terjadi karena pemerintah daerah mampu dan cepat tanggap terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Aspek akuntabilitas rata-rata indeks yang diperoleh adalah 2,73 dengan kategori baik. Dalam hal akuntabilitas Bupati mampu untuk mengelola keuangan daerah dan mampu untuk melaksanakan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Akan tetapi, dalam hal transparansi pengelolaan keuangan belum dilakukan, karena masyarakat masih belum tahu terkait APBD, PAD dan penerimaan daerah lainnya yang diperoleh untuk menjalankan program apa saja. Hal ini terjadi karena Pemerintah Kabupaten Bantul belum menerapkan *e-budgeting*. Sementara itu, terkait transparansi birokrasi juga perlu diperbaiki, karena masih banyak yang tidak diketahui oleh masyarakat seputar apa yang terjadi di pemerintahan.

Dalam penelitian ini, perbedaan persepsi dari setiap masyarakat disebabkan karena sebuah persepsi terbentuk dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal itu terbentuk berdasarkan pengalaman, pengetahuan, tingkat pendidikan, dan pekerjaan. Akan tetapi, faktor yang paling banyak mempengaruhi adalah pengalaman dan pengetahuan. Sedangkan untuk faktor eksternal itu dipengaruhi

oleh lingkungan tempat tinggal, serta berasal dari orang-orang terdekat atau dapat juga disebut *social relationship*. Contohnya masyarakat dapat mengatakan bahwa adanya peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan namun tidak pernah melihatnya sendiri, persepsi tersebut terbentuk karena mendengar dari orang terdekat. Hal ini kemudian mempengaruhi seorang individu dalam memberikan persepsi terkait kinerja dari Pemerintah Kabupaten Bantul.

Selain itu, dalam memberikan persepsi juga mempertimbangkan segi positif dan negatif. Maksudnya adalah ketika seorang individu mendapatkan dampak yang positif dari kinerja Bupati maka akan cenderung memberikan persepsi yang baik pula. Begitu juga sebaliknya jika mendapatkan dampak yang negatif atau tidak begitu menguntungkan maka akan memberikan persepsi yang negatif. Hal ini disebut juga dengan *Impression Formation*. Seperti saat penulis melakukan wawancara ada beberapa masyarakat yang cenderung mencibir dan mengatakan kinerja dari Bupati itu sangat buruk dalam hal transparansi birokrasi. Tidak hanya berdasarkan kata-katanya saja namun juga diekspresikan melalui mimik wajah, hal ini diperoleh melalui pengamatan saat penelitian. Hasil dari pengamatan yang lain adalah melihat keadaan infrastruktur jalan, jembatan, pasar, selain itu juga melihat langsung Puskesmas dan cara pelayanannya.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini jika dilihat dari 4 aspek produktifitas, kualitas layanan, responsivitas, dan akuntabilitas keseluruhannya baik. Untuk aspek produktifitas rata-rata indeks yang diperoleh 2,74 dengan kategori baik karena, selain itu juga lebih efektif, efisien, serta Bupati memiliki dedikasi yang baik.

Aspek kualitas layanan rata-rata indeks yang diperoleh adalah 2,96 dengan kriteria baik, hal ini disebabkan karena kualitas pelayanan yang diberikan meningkat, selain itu kualitas dan sarana prasarana kesehatan juga mengalami peningkatan dan perbaikan, sehingga masyarakat puas dengan pelayanan yang diberikan.

Aspek responsivitas rata-rata indeks yang diperoleh 2,64 dengan kriteria baik, karena meningkatnya kualitas pendidikan, kualitas sarana dan prasarana ekonomi, masyarakat semakin sejahtera, kemudian peningkatan dalam hal ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi. Sektor pariwisata yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, selain itu juga sarana dan prasarana publik untuk penanggulangan bencana mengalami peningkatan. Akan tetapi, yang belum mampu ditangani adalah pengangguran karena tidak mengalami penurunan, hal ini disebabkan ketidakmampuan Bupati untuk membuka lapangan pekerjaan. Tidak hanya itu terkait jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan belum merata dan tidak tepat sasaran.

Aspek akuntabilitas rata-rata indeks yang diperoleh adalah 2,73 dengan kategori baik. Dalam hal akuntabilitas, Bupati mampu untuk mengelola keuangan daerah dan mampu untuk melaksanakan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Akan tetapi, dalam hal transparansi pengelolaan keuangan belum dilakukan, karena masyarakat masih belum tahu terkait APBD, PAD dan penerimaan daerah lainnya yang diperoleh untuk menjalankan program apa saja. Hal ini terjadi karena Pemerintah Kabupaten Bantul belum menerapkan *e-budgeting*, selain itu terkait transparansi birokrasi perlu diperbaiki, karena masih banyak yang tidak diketahui oleh masyarakat seputar apa yang terjadi di pemerintahan.

Kinerja keseluruhan Pemerintah Kabupaten Bantul pada masa Kepemimpinan Sri Surya Widati dalam kategori baik dengan rata-rata indeks 2,73. Hasil ini diperoleh berdasarkan jawaban dari masyarakat, namun ada beberapa catatan yang perlu diperbaiki yaitu transparansi pelayanan dan keuangan, pengangguran, dan jaminan kesehatan yang belum merata dan tetap sasaran, karena 4 hal tersebut yang dinilai kurang baik oleh masyarakat. Akan tetapi, terkait capaian yang diungkapkan oleh level elit dan juga indikator kinerja yang mencapai 100% dalam LKJ 2015 juga dirasakan oleh masyarakat Kretek, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya nilai rata-rata dengan kriteria kurang baik terhadap capaian Pemerintah Kabupaten Bantul tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi, Isbandi Rukminto.(1994). *Psikologi, Pekerjaan Sosial, dan Ilmu Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: PT Rajawali Grafindo.
- Azwar, Saifuddin.(1998). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar (Anggota IKAPI).
- Black, James.A dan Champion, Dean. J.(1992). *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*. Bandung: REFIKA ADITAMA.
- Dwiyanto, Agus. (2012). *Revormasi Birokrasi Publik di Indonesia*.Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hadi, Sutrisno. (1993). *Statistik 2*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hanurawan, Fattah. (2010). *Psikologi Sosial*. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA.
- Hasan, M. Iqbal. (2015). *Pokok-pokok Materi Statistik 2*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Kaloh. J. (2003). *Kepala Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Karim, M.Rusli. (1991). *Pemilu Demokratis Kompetitif*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya.
- Kreitner, Robert dan Kinicki, Angelo. (2003). *Perilaku Organisas*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mikkelsen, B. (1999). *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Moleong, Lexy. J. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mukarom, Zaenal dan Muhibudin Wijaya Laksana. (2016). *Membangun Kinerja Pelayanan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Mutiarin, Dyah dan Arif, Zaenudin. (2014). *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Noor, Juliansyah. (2011). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Kencana Group.

- Nugroho, Riant. (2000). *Otonomi Daerah Desentralisasi Tanpa Revolusi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Prawirosentono, Suyudi. (1992). *Kebijakan Kinerja Karyawan : Kiat Membangun Organisasi Kompetitif Menjelang Perdagangan Bebas Dunia*. Yogyakarta: BPEE.
- Salim, Agus. (2006). *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Sarwono, S. W. (1984). *Teori-teori Psikologi Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Siagian, Sondang.P. (1989). *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Haji Masagung
- Sodikin. (2014). *Hukum Pemilu*. Bekasi: Gramata Publishing.
- Sugiyono. (2005). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Suranto. (2006). *Modul Aplikatif Statistik Sosial*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Sutrisno, Edi. (2010). *Budaya Organisasi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Tangklian, Hessel.N. S. (2005). *Manajemen Publik*. Jakarta: Grasindo.
- Umar, Husein.(2005). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Thesis Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Usman, Husaini dan Akbar, Purnomo Setiady. (2008). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Walgito, Bimo. (2003). *Psikologi Sosial Yogyakarta*. Yogyakarta: Andi Offset.

Data Desa

- Data Monografi Desa Parangtritis Semester 1 (2016)
- Data Monografi Desa Donotirto Semester 1 (2016)
- Data Monografi Desa Tirtomulyo Semester 1 (2016)
- Data Monografi Desa Tirtosari Semester 1 (2016)
- Data Monografi Desa Tirtohargo Semester 1 (2016)

Jurnal

- Rahaditama, M.W. (2012). *Analisis Kinerja Kepala Daerah Berlatar Belakang Pengusaha*. Naskah Publikasi. Universitas Muhammadiyah Surakarta. (http://eprints.ums.ac.id/19327/28/Naskah_Publikasi.pdf, diakses pada 26 Oktober 2016 jam 11.57 WIB)
- Sari, Dewi.N. (2014). *Persepsi Masyarakat Randukuning terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Desa*. Jurnal PPKn IKIP Veteran Semarang, Vol.2,

No.1.

(<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=267412&val=6773&title=PERSEPSI%20MASYARAKAT%20RANDUKUNING%20TERHADAP%20KINERJA%20APARATUR%20PEMERINTAH%20DESA>, diakses pada 26 Oktober 2016 jam 12.47 WIB).

Somba, Skivo. (2011). *Persepsi Masyarakat terhadap Kinerja Lurah di Kelurahan Aertembaga Kota Bitung*. (<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/viewFile/8641/8208>, diakses pada 12 Desember 2016, jam 09:22 WIB).

Skripsi Online

Nurhaya, Sri.P. (2009). *Kinerja Lembaga Legislatif*. (Skripsi).

Sari, Dwi.L. (2016). *Persepsi Masyarakat terhadap Kinerja Aparatur Desa dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Desa Bumi Agung Marga Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Timur*. (Skripsi). (<http://digilib.unila.ac.id/22404/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf> , diakses pada 26 Oktober 2016 jam 11.33 WIB)

Undang-undang

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Wawancara

Bu Sri, 37 tahun, pedagang (wawancara 3 November 2016, jam 9:17 WIB)

Bu Rosida, 42 tahun, petani (wawancara 3 November 2016, jam 11:22 WIB)

Bu Ratna, 42 tahun, PNS (wawancara 3 November 2016, jam 12:55 WIB)

Pak Sunarto, 52 tahun, buruh tani (wawancara 3 November 2016, jam 13:37 WIB)

Bu Ismiati, 50 tahun, buruh tani (wawancara 3 November 2016, jam 14:35 WIB)

Pak Tri, 57 tahun, PNS (wawancara 4 November 2016, jam 8:15 WIB)

Bu Maya, 29 tahun, Guru (wawancara 4 November 2016, jam 9:05 WIB)

Bapak Rian, 30 tahun, petani (wawancara 4 November 2016, jam 10:44 WIB)